



Jejaring Kebijakan pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Semarang

Florentina Nurika Retno Ayu Widuri^{1*}, Tri Yuniningsih², Teuku Afrizal³

^{1,2,3}Universitas Diponegoro

*) Penulis Korespondensi : flo.retno@gmail.com

Abstract. *The lack of community participation, coordination between actors is still low, actors aren't yet closely connected, no binding agreement, domination and lack of commitment by government actors are the reasons why the solid waste management policy didn't run well. According to sustainable development goals, consistent and committed cooperation is needed among the actors. The importance of this research is to analyse the network of policies on waste management. This study uses DeLeon and Varda's and Thomas and Grindle's. Data collection uses interview with informants selected through purposeful technique and document studies. This study uses qualitative method. The result is the policy networking of solid waste management at Semarang District has almost fulfilled these seven characteristics. It can be more optimal because the actors that represent don't include business and media actors, the hierarchical power structure, and the inevitable domination of government actors. Supporting factors include elements of participation, pluralism, and openness. The inhibiting factor is the element of collaboration that hasn't been achieved due to the lack of cooperation with business actors. The results above can be used as a reference for widening the collaboration, especially between business actors, community actors, and media actors in waste management in Semarang District.*

Keyword: *participation, policy network, waste management.*

Abstrak. *Kurangnya partisipasi masyarakat, koordinasi antar aktor masih rendah, keterikatan aktor belum erat, belum adanya perjanjian mengikat, dominasi dan kurang komitmen aktor pemerintah merupakan alasan mengapa kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik. Merujuk pada pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya kerjasama yang konsisten dan berkomitmen. Pentingnya penelitian ini adalah menganalisis jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teori milik DeLeon dan Varda dan Thomas dan Grindle. Data diperoleh dari wawancara dengan informan dari aktor pemerintah, komunitas, dan akademisi yang didapatkan melalui purposeful sampling; dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah telah hampir memenuhi tujuh karakteristik milik DeLeon dan Varda, walaupun beberapa masih belum maksimal, karena aktor yang mewakili belum meliputi aktor bisnis dan aktor media, struktur kekuasaan hierarkis, dan dominasi aktor pemerintahan. Faktor pendukung jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang melingkupi elemen partisipasi, elemen pluralisme, dan elemen keterbukaan. Faktor penghambatnya adalah elemen kolaborasi yang belum tercapai, karena kurangnya kerjasama dengan aktor bisnis. Hasil penelitian ini perlunya dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kerjasama aktor, khususnya antara aktor bisnis, aktor komunitas, dan aktor media dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.*

Kata Kunci: *jejaring kebijakan, partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah.*

diunggah: Maret 2023; direvisi: November 2023; disetujui: Januari 2024

This is an open access article under the CC-BY licence



© the Author(s). 2024

Cara Sitasi: Widuri, Florentina Nurika Retno Ayu et al (2024). Jejaring Kebijakan Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 8(1), 14-29. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i1.430>

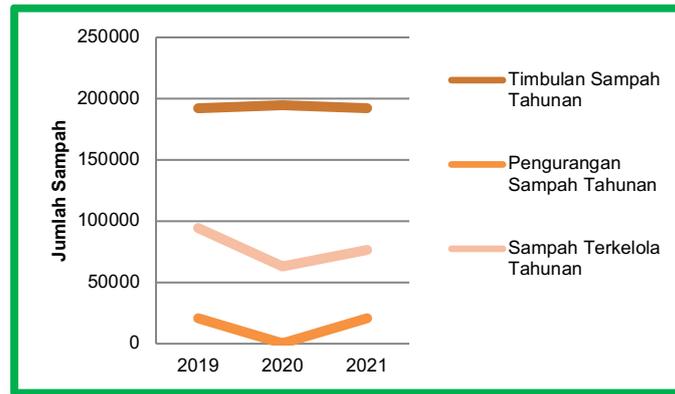
PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang termuat dalam *Sustainable Development Program (SDGs)* yang hendak diwujudkan pada tahun 2030 nanti, tercermin dalam perihal kesehatan masyarakat, masalah lingkungan, dan nilai sumber daya, termasuk dengan perubahan iklim dan akses sumber daya yang merata bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan sampah di negara berkembang menjadi salah satu upaya dasar untuk mewujudkan hidup yang lebih baik, sesuai dengan target ke-11 tujuan pertama, yakni: "Sebelum tahun 2030, menjamin akses yang memadai bagi semua, rumah yang aman dan terjangkau, serta layanan dasar dan mementaskan kawasan kumuh". Selain pengumpulan dan pengelolaan sampah, sanitasi juga merupakan layanan dasar untuk mewujudkan tujuan tersebut (Rodić & Wilson, 2017:1).

Perda Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 memuat tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang. Tujuan ke-11 pada bagian Lingkungan Hidup memuat isu strategis mengenai masih rendahnya penanganan sampah perkotaan, yang tercermin pada keterbatasan kapasitas TPA Blondo yang hanya mampu mengelola sampah 21%, sehingga perlu membangun TPA baru; dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari pembuangan limbah padat sebanyak 103 ribu ton CO₂ dan terus meningkat.

Permasalahan sampah berdasarkan isu strategis di atas adalah volume timbulan sampah di TPA Blondo yang tidak dapat lagi diolah secara maksimal. Dari beberapa penelitian terdahulu, volume sampah yang semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya jumlah populasi manusia, terlebih di beberapa kota besar. Contohnya di Kota Manado terjadi kenaikan volume sampah dari tahun 2014 hingga 2017 sebanyak 15,5% dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 10,5% (Mokodompis et al., 2019). Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Konawe, sebagaimana Amir & Anto (2018) menyatakan bahwa peningkatan volume sampah dipengaruhi oleh banyaknya populasi, terlebih faktor urbanisasi yang memunculkan masalah kebersihan, kesehatan masyarakat dan lingkungan ibu kota Kabupaten Konawe itu sendiri. Hoorweg dan Bhada-Tata dalam Shams et al. (2017) memperkirakan timbulan sampah di Asia akan mencapai 1,8 juta ton per hari pada tahun 2025.

Gambar 1 di bawah menunjukkan *gap* antara timbulan sampah dengan jumlah sampah yang berkurang dan dikelola setiap tahunnya dari tahun 2019-2021 di Kabupaten Semarang. Dari rata-rata 200.000 ton sampah yang terkumpul setiap tahunnya, sampah yang berkurang hanya sekitar 50.000-100.000 ton, dan kurang dari 50.000 ton sampah yang terkelola.



Gambar 1. Data Sampah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021

Sumber: SIPSN (2019-2021)

Dari 200.000 ton sampah tahunan di atas, 30% sampah berasal dari pasar, 20% dari rumah tangga, 10% dari area perkantoran, 10% lainnya dari kegiatan perniagaan, dan sisanya berasal dari fasilitas publik, kawasan, dan lain-lain. Sampah yang bersumber dari kawasan-kawasan di atas merupakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari penduduk atau masyarakat dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Aktor pemerintah harus bekerja bersama aktor-aktor kepentingan lain untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memuat tujuan kebijakan ini, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga ada kejelasan dalam hal tanggung jawab, peran serta masyarakat, dan dunia usaha. Pasal 11 menambahkan aktor yang berkepentingan adalah setiap orang atau produsen sampah itu sendiri, yakni masyarakat.

Ariyanto & Marom (2021:9-14) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan subjek penting untuk diajak bekerja sama untuk memaksimalkan program pengelolaan sampah. Pentingnya partisipasi masyarakat adalah untuk menjaga keberlangsungan program itu sendiri, selain kewajiban masyarakat untuk mengelola sampahnya. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki beberapa program pengelolaan sampah, di antaranya bank sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*reuse, reduce, recycle*). Akan tetapi, fasilitas yang menunjang program tersebut tidak memiliki kinerja yang baik, salah satunya karena partisipasi masyarakat yang rendah. Sementara itu, jumlah TPS 3R di Kabupaten Semarang hanya berjumlah 9 (sembilan) dan 1 (satu) yang tidak aktif untuk wilayah yang luasnya 95.020,674 Ha. Akan tetapi, penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPS 3R ini pun masih ada kendala. Penelitian oleh Wardhani (2020:11) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di TPS 3R Desa Bergas Kidul menunjukkan sulitnya kesulitan untuk membangun kepercayaan di antara masyarakat yang masih belum memahami bagaimana pengelolaan sampah yang benar. Berdasarkan Sistem Informasi Pengolahan Sampah (SiLopah), Kabupaten Semarang memiliki 170 (seratus

tujuh puluh) BSU yang terdaftar, 30 (tiga puluh) BSU tidak aktif. Kinerja bank sampah di Kabupaten Semarang masih belum baik dengan rentang capaiannya hanya rendah dan sangat rendah.

Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh pengurus yang kurang aktif dan kegiatan penyeteroran sampah yang tidak rutin diakibatkan kurangnya waktu (Oktaviana et al., 2022:6-7), pola pikir masyarakat, tidak memiliki waktu untuk memilah, malas untuk menimbun sampah untuk disetorkan ke bank sampah, dan kesibukan masyarakat (Ezra et al., 2022:8), serta sebagian masyarakat merasa bahwa bank sampah tidak menandakan bahwa mereka sudah melakukan pengelolaan sampah dengan benar, dan bank sampah tidak terlalu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Fatahya & Abidin, 2017:553).

Kendala lainnya tidak hanya pada partisipasi masyarakat, melainkan juga komitmen aktor pemerintah. Perbandingan kuantitas dengan kualitas fasilitas pengelolaan sampah di atas juga menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. Seperti yang terjadi di Pemerintah Desa Bergas Kidul juga belum mampu menyediakan tambahan operator dan dana untuk kesejahteraan operator (2020:11). Komunikasi dan koordinasi antar aktor juga masih belum maksimal. Komunikasi antar aktor dapat juga dibangun dengan mempromosikan program atau produk melalui media massa, seperti radio lokal dan surat kabar. Akan tetapi, kerja sama dengan media massa untuk membangun komunikasi antar aktor juga masih jarang dilakukan oleh aktor yang berkepentingan dalam pengelolaan sampah. Contoh kasusnya ditemukan oleh Ismiartha et al. (2021:11) pada Program Kampung Iklim (Proklam) Dusun Soka yang belum ada upaya *branding* atau promosi dari pihak internal dibandingkan media massa.

Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, keterlibatan aktor lain dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah ada dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku pengelola TPS 3R dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola sampah. DLH menjelaskan bahwa belum ada perjanjian kerja yang resmi dan mengikat seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa aktor. DLH juga bekerja sama dengan beberapa sekolah adiwiyata yang digiatkan dalam kegiatan berwawasan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Beberapa perusahaan dari sektor privat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, seperti perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Coca-Cola Amatil Indonesia, dan PT Mangkokmas.

Berdasarkan persoalan dan temuan-temuan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Semarang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada jejaring kebijakan tersebut.

Penelitian mengenai jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Indonesia, dan diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan ilmu Administrasi Publik, terlebih pada fokus jejaring kebijakan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam mengelola sampahnya sendiri sebagai wujud kontribusi dan keterlibatan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Bagi pemerintah, menjadikan ini sebagai referensi dan masukan untuk lebih mensinergikan para aktor dalam kebijakan pengelolaan sampah, sehingga dapat menciptakan wilayah yang bersih, sehat, layak huni, dan berkelanjutan.

Menurut Freeman (1984) dalam Vos (2003:142), aktor biasanya terdiri dari individu atau kelompok / grup. Berdasarkan *Actor-Network Theory* (ANT) oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law, jejaring disusun oleh berbagai elemen yang disebut Aktan, berupa manusia, alat teknologi, organisasi, institusi, dan lain-lain (Yusuf et al., 2016:7). Etzkowitz dalam Muharam et al. (2021:87) menyebutkan jejaring melibatkan lima aktor, yakni bisnis, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media. Peran aktor dibagi menjadi empat, yaitu *partner*, *consult*, *inform*, dan *control*; didasari pada tingkat *influence* dan *importance* aktor (Viney, 2007:2).

DeLeon & Varda (2009:65) mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai kerja sama diskursif yang memuat dukungan politik, tujuan bersama, timbal balik yang berupa sumber daya milik bersama, keterwakilan/keberagaman, struktur kekuasaan yang rata, pengambilan keputusan yang partisipatif, kepemimpinan kolaboratif, berbagi pengalaman dan norma, interaksi yang sering, syarat kepercayaan dan resolusi konflik. Kedua tokoh ini kemudian menyusun jejaring kebijakan dengan 7 (tujuh) karakteristik.

Pertama *Representation/diversity* yang artinya keterwakilan atau keberagaman aktor dalam jejaring kebijakan dapat menciptakan hasil yang inovatif dan berkelanjutan. Sehingga, jejaring terbentuk berdasarkan topik kebijakan yang sedang dibahas saat itu, dan kemungkinan besar untuk dapat menciptakan grup *stakeholders* yang beragam. Karakteristik ini menilai *homophily* atau kesamaan sebagai atribut para anggota jejaring. Kedua, *Reciprocity* yaitu hubungan timbal-balik terjadi ketika aktor-aktor saling terhubung melalui pertukaran sumber daya. Interaksi antar aktor ini tidak hanya berlangsung dalam sebuah hubungan timbal-balik, melainkan juga kepercayaan dan hubungan mutual yang suportif. Untuk mengukur hasil dari jejaring itu adalah ketika para aktor saling bertukar respon atau timbal-balik. Ketiga, *Horizontal Power Structure* yaitu dalam jejaring kebijakan kolaboratif, tingkat desentralisasi yang tinggi membantu pertukaran informasi lebih luas dan mencakup lebih banyak aktor; menciptakan hubungan yang merata dan sederajat, sehingga memiliki keinginan untuk saling mendukung satu sama lain. Sebaliknya, menurut prinsip sentralisasi, struktur hierarki pemerintahan memuat aktor utama yang mengkoordinasikan jejaring guna meningkatkan konektivitas dan menyukseskan pencapaian tujuan bersama. Hasil karakter ini merupakan tingkat sentralisasi dalam jejaring. Keempat, *Embeddedness* atau keterikatan adalah salah satu faktor keberhasilan jejaring kebijakan yang dilihat dari keakraban para aktor. Dalam jejaring kebijakan kolaboratif, keterikatan dilihat melalui keberlangsungan hubungan, khususnya *multi-relationship* dari waktu ke waktu, baik dalam hubungan formal maupun informal. Jejaring kebijakan bekerja untuk dapat mengatasi lebih dari satu permasalahan kebijakan. Karakteristik ini menganalisis berbagai tipe hubungan dalam jejaring kebijakan tercipta dan dinilai seberapa lama hubungan tersebut yang dapat dibangun. Kelima, *Trust and Formality*. Formalitas dalam jejaring kebijakan ditunjukkan berbagai tingkat formalitas, termasuk perjanjian kontrak, pedoman peraturan, proses prosedural, dan pertukaran informal. Pada tingkat tertentu, formalitas memengaruhi kepercayaan yang dibangun dalam jejaring kebijakan. Formalitas diukur melalui kontrak dan interaksi, dan kepercayaan berdasarkan ketahanan uji, keharmonisan misi, dan komunikasi yang transparan. Keenam, *Participatory Decision Making*. Salah satu kunci utama dalam demokrasi partisipasi adalah kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menunjukkan kepentingan dan kebutuhan setiap aktor yang berkaitan dengan persoalan tertentu. Proses ini memerlukan transparansi dan kesetaraan. Karakteristik ini menilai struktur sosial kognitif, transparan, sentralisasi, dan peran

pengambilan keputusan dalam jaringan. Terakhir, *Collaborative Leadership*. Pemimpin dalam jejaring kebijakan sebaiknya memperlihatkan kesetaraan, sehingga setiap aktor yang ada di dalamnya harus memiliki nilai kepemimpinan yang serupa. Hasilnya, para pemangku kebijakan yang setara secara struktural akan menjadi pemimpin untuk menjaga keseimbangan hubungan dalam jejaring.

Thomas dan Grindle mencetuskan empat elemen yang membentuk *multi-stakeholders governance*, yaitu partisipasi, pluralisme, keterbukaan, dan kolaborasi untuk menganalisis faktor pendukung dan pendorong, (Muhamad Azahar Abas & Wee, 2016:28). Partisipasi dan kolaborasi antar *stakeholders* dalam implementasi kebijakan publik penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sementara itu, keterbukaan dan keberagaman atau pluralisme penting untuk memastikan masyarakat paham dengan tujuan kebijakan. Mengadaptasi dari konsep ini, dalam mewujudkan jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah, keempat elemen tersebut menjadi acuan untuk menganalisis lebih dalam faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Tidak hanya faktor eksternal, melainkan juga faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data lapangan yang berupa teks wawancara dan dokumen tentang jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan enam informan yang telah ditentukan atau *purposive sampling* dari hasil penelitian terdahulu dan pra-penelitian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan data sekunder dari studi dokumen berupa artikel berita dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Enam informan yang telah ditetapkan terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor pemerintah, BUMDes, Forum RELINKO dan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai aktor komunitas, serta SMA Negeri 1 Bergas dan SMA Negeri 1 Bringin sebagai aktor akademisi.

Analisis data hasil penelitian ini menggunakan *software* Atlas.ti versi 8 untuk *coding* data. Setelah melakukan reduksi data, penulis memilih kata kunci dari setiap sub-fenomena penelitian. Kata-kata kunci yang telah ditemukan akan ditampilkan dalam bentuk jaringan yang menggambarkan hasil penelitian. Analisis data dengan Atlas.ti 8 membantu penulis mentransformasikan data tertulis dari transkrip wawancara dan dokumen tertulis yang terkait dengan topik penelitian hingga menjadi grafik yang sesuai dengan pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pendekatan analisis kebijakan publik, langkah pertama yang penting adalah mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat (Dente, 2014:29). Aktor menurut Freeman dalam Vos (2003:143) mendefinisikan aktor dalam organisasi (jejaring) adalah grup atau individu yang dapat saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Aktor yang berhasil diidentifikasi dalam jejaring kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Semarang, dibagi menjadi dua, yaitu Aktor Non-Manusia dan Aktor Manusia.

Rhodes (2016) menyebut aktor non-manusia ini adalah *metagovernance* dan berupa regulasi (Gayatri et al., 2019:55). Pada penelitian ini, selain regulasi, aktor non-manusia

termasuk sosial media atau aplikasi pesan daring. Kepala Bagian III Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang menambahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Jakstrada merupakan peraturan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Arah kebijakan pengurangan sampah dalam Pasal 3 Ayat (2) adalah pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah. Target yang hendak dicapai yaitu 30% timbulan sampah rumah berkurang; dan 70% timbulan sampah tersebut ditangani di tahun 2025 nanti. Sosial media dan aplikasi pesan *online* sendiri merupakan aktor non-manusia yang sering disebutkan secara tidak langsung sebagai sarana komunikasi para aktor. Sosial media berperan dalam menghubungkan aktor-aktor yang memiliki ketertarikan terhadap bidang yang sama, sehingga menciptakan sebuah jaringan.

Aktor manusia merupakan individu atau kelompok dalam jejaring kebijakan. Dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang, aktor yang terlibat secara langsung dan tidak langsung meliputi menjadi lima kelompok, yakni aktor pemerintah, aktor bisnis, aktor komunitas, aktor akademisi dan aktor media. Berikut daftarnya:

Tabel 1.

Aktor Manusia pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Semarang

Kelompok Aktor	Aktor Diketahui
Aktor Pemerintah	DLH Kabupaten Semarang, BKUD, PDAM, Barenlitbangda / Bappeda, dan BUMDes
Aktor Bisnis	PT Coca-Cola Amatil Indonesia dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul
Aktor Komunitas	KSM di TPS 3R, Forum Relinko, Mercy Cops Indonesia, Green Peace, Walhi, dan Yayasan Bintari
Aktor Akademisi	SMA Negeri 1 Bergas dan SMA Negeri 1 Bringin
Aktor Media	Kompas, Republika, DetikNews.com, TribunMuria, JatengDaily, TvOne, dan AyoSemarang, Solopos.

Sumber: data penelitian diolah (2023)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang menyebut mereka sebagai *leading sector* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. BKUD (Badan Keuangan Daerah) bertanggung jawab dalam pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) bertugas dalam penarikan retribusi sampah setiap bulannya. Bappeda/Barenlitbangda bertugas untuk memasukkan data-data terkait lingkungan hidup dalam *data base*. Aktor pemerintah juga meliputi pemerintah desa yaitu Pemerintah Desa yang mengelola Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen menjalankan bank sampah di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, dengan 350 nasabah.

Aktor bisnis yang terlibat langsung adalah PT Coca-Cola Amatil Indonesia dan secara tidak langsung adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Mengutip Jateng Daily (14/2/2020), PT Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) bersama Yayasan Bintari (Bina

Karta Lestari) mendampingi warga Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, dengan memberikan edukasi melalui berbagai langkah untuk mengembangkan bank sampah.

Melansir Pribadi & Aminah (2020), media *online* Republika.com, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul terlibat dalam pemberian bantuan berupa 60 unit peralatan cuci tangan diberikan kepada DLH Kabupaten Semarang yang dipasang di TPA Blondo dan lingkungan sekitar Desa Diwak dan Desa Bergas Kidul, serta 185 kebutuhan pokok bagi petugas layanan kebersihan dan persampahan di masa pandemi.

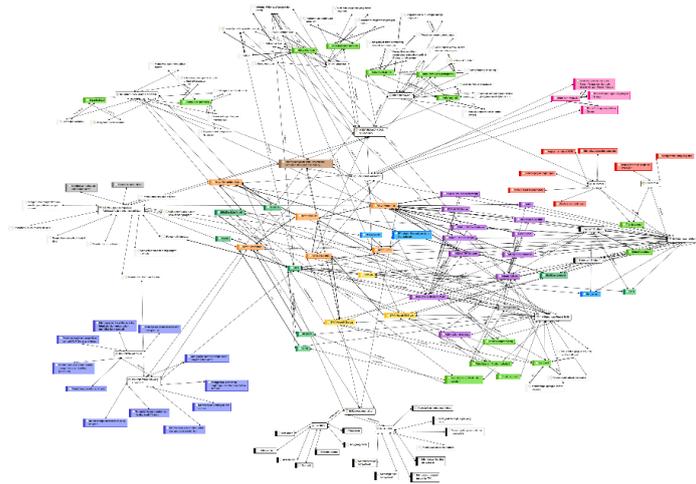
Aktor komunitas yaitu KSM di TPS 3R Bhismas Mulia yang merupakan satu-satunya TPS 3R yang berhasil tidak menyumbang sampah di TPA Blondo dan mendapatkan izin untuk mengelola sampah di tingkat kecamatan; dan Forum Relinko (Relawan Lintas Komunitas) yang merupakan binaan DLH Kabupaten Semarang, terdiri atas berbagai komunitas lintas sektor yang fokus pada pengelolaan sampah dengan berbagai metode, seperti pengelolaan sampah organik menjadi pakan ternak BSF dan menjadi *eco enzyme*. Forum Relinko bekerja sama dengan aktor komunitas lainnya, yaitu Mercy Cops Indonesia, Green Peace, Walhi, dan Yayasan Bintari dalam periode tertentu. Yayasan Bintari (Bina Karta Lestari) sendiri adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari Kota Semarang.

Aktor akademis yang ada dalam penelitian ini terbatas pada sekolah adiwiyata, yaitu SMA Negeri 1 Bergas dan SMA Negeri 1 Bringin sebagai sekolah adiwiyata. Berdasarkan hasil wawancara, sekolah-sekolah ini memiliki bank sampah untuk mengedukasi siswa-siswinya untuk memilah sampah sebelum masa pandemi. Sekolah turut menanamkan nilai tanggung jawab terhadap lingkungan kepada masyarakat sedari dini.

Aktor media di atas tadi tidak teridentifikasi langsung, karena DLH Kabupaten Semarang tidak bekerja sama dengan aktor media. Biasanya media datang dan mewawancarai DLH saja. Justru, aktor bisnis, PT Coca-Cola Amatil Indonesia, membuat publikasi terkait pembinaan masyarakat di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas melalui media *JatengDaily*. PT Coca-Cola Amatil Indonesia juga menyelenggarakan webinar "Pengelolaan Sampah Plastik", melibatkan *The Society of Indonesian Environmental Journalists* (SIEJ) dan wartawan dari beberapa daerah. Sehingga, dari penelitian ini muncul media-media di atas yang mempublikasikan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.

Aktor-aktor yang telah teridentifikasi di atas tergabung dalam sebuah jejaring kebijakan yang dijelaskan dengan teori *collaborative policy network* oleh DeLeon dan Varda. Pertama, dilihat dari keberagaman aktor. Karakter ini berkaitan dengan kesamaan sifat (atribut), yakni tujuan dan nilai, yang dimiliki aktor dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Semakin selaras tujuan dan nilai yang dimiliki berbagai aktor akan membangun sebuah hubungan yang harmonis antar aktor. Nastase et al., (2019:855) mengutip Celata & Sanna (2014) yang mengatakan bahwa penelitian di bidang pengelolaan sampah memang biasanya menunjukkan kompleksitas proses dan keberagaman aktor yang terlibat dalam kebijakan.

Hasil analisis dengan Atlas.ti 8 menunjukkan jejaring kebijakan yang terbentuk pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada gambar 2. Hasil penelitian dengan teori DeLeon & Varda (2009) memperlihatkan keterlibatan berbagai aktor di Kabupaten Semarang yang tidak hanya dilihat dari perannya saja, melainkan juga dengan tujuan, nilai, hubungan antar aktor, keterikatan, kepercayaan dan formalitas, pendelegasian wewenang, partisipasi dalam kebijakan, hingga kepemimpinan yang kolaboratif.



Gambar 2. Hasil Analisis Jejaring Kebijakan pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Semarang menggunakan Atlas.ti 8

Sumber: Data Penelitian Diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang berada dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang menunjukkan keberagaman aktor dari tujuan dan nilai yang dianut mereka. Tujuan pengelolaan sampah secara umum, yaitu untuk melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menyejahterakan masyarakat. Tujuan khususnya yaitu mengurangi sampah yang masuk ke TPA Blondo, meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan kembali, dan membuka lapangan pekerjaan di bidang ini. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, nilai yang dipegang pada pengelolaan sampah ini beragam dan ada beberapa aktor yang memegang nilai yang sama. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi kerja sama, kesadaran, tanggung jawab, ketekunan, ekonomi, dan aksesibilitas.

Kedua, hubungan timbal balik yaitu hubungan antar aktor dalam jejaring kebijakan yang terbangun atas dasar intensitas pertukaran informasi dan sumber daya dan bagaimana para aktor tersebut meresponnya. Pertukaran informasi yang intens terjadi di antara DLH, aktor bisnis, BKUD, Barenlitbangda, BUMDes dan KSM di TPS 3R Bhismas Mulia, serta masyarakat. Di sisi lain, masih ada aktor yang tidak pernah mendapatkan informasi, yaitu SMA Negeri 1 Bringin. Selebihnya, hubungan aktor lainnya tidak intens atau sifatnya insidental. Pertukaran sumber daya berupa modal terjadi antara DLH Kabupaten Semarang dengan BKUD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang terkait program-program pengelolaan sampah; dan dengan BUMDes Estu Mukti yang rutin membayar biaya administrasi untuk pengangkutan sampah di TPS. Sumber daya lainnya adalah fasilitas pengelolaan sampah, seperti armada pengangkut sampah di setiap posko pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan TPS. Aktor-aktor dalam jejaring kebijakan cukup responsif terhadap informasi yang berupa aduan, sosialisasi dan/atau permintaan bantuan, dengan cepat dan tanggap. Salah satu contohnya adalah Forum Relinko yang memberikan respon berupa saran.

Jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang ini sudah berjalan, karena sudah pertukaran informasi dan sumber daya intens dan aktor yang responsif. Namun, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang bisa lebih maksimal melalui pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih intens dan

sikap aktor yang responsif. Merujuk pada penemuan Rahman et al. (2020:109) di Kabupaten Bekasi, salah satu penyebab implementasi kebijakan pengelolaan sampah kurang optimal adalah kurangnya sumber daya dan biaya (keuangan).

Ketiga, struktur kekuasaan horizontal yang berkaitan dengan desentralisasi kewenangan dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Desentralisasi kewenangan pada jejaring ini belum tinggi, walaupun setiap aktor diberikan atau memiliki keleluasaan untuk mengelola sampah dalam lingkungannya. DLH Kabupaten Semarang masih menjadi aktor sentral yang memiliki kewenangan untuk mengakomodasi dan memberikan fasilitas, mengawasi jalannya pengelolaan sampah, memberikan laporan dan menindaklanjuti perkara atau masalah yang terjadi.

Aktor-aktor lain diberikan keleluasaan untuk aktor-aktor tersebut mengelola sampahnya sesuai wilayah kerja dan kapasitas secara mandiri. BUMDes Estu Mukti diberikan keleluasaan untuk mengelola sampah di tingkat Desa Bejalen untuk mengumpulkan sampah di TPS yang akan diangkut ke TPA oleh petugas kebersihan dan persampahan Kabupaten Semarang. KSM di TPS 3R Bhismas Mulia yang terletak di desa mendapatkan kewenangan untuk mengelola sampah di tingkat Kecamatan Banyubiru karena keberhasilannya mengelola sampah, sehingga tidak mengirim sampah ke TPA. Sekolah-sekolah adiwiyata, SMA Negeri 1 Bergas dan SMA Negeri 1 Bringin, juga secara mandiri mengelola sampahnya.

Keempat, keterikatan diterjemahkan melalui beberapa hubungan yang terjalin antara aktor-aktor dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Keterikatan antar aktor dilihat dari seberapa lama hubungan dan tipe yang dapat berbentuk formal maupun informal. Beberapa aktor sudah terhubung lama, terhitung lebih dari lima tahun. DLH Kabupaten Semarang dengan aktor pemerintah lainnya yang terhubung sejak berdirinya instansi tersebut dan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah; dengan aktor akademis juga sudah terjalin lima tahun lebih sejak menjadi sekolah adiwiyata. Forum Relinko juga sudah berhubungan lama dengan NGO yang disebutkan sebelumnya. Sementara itu, KSM di TPS 3R Bhismas Mulia masih baru memulai koneksinya dengan sesama pengelola di TPS lainnya di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menemukan dualisme arti dari hubungan formal yang terbentuk di antara aktor dalam jejaring kebijakan ini. Pertama, hubungan formal dapat ditandai dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara mereka, baik tertulis maupun lisan dan interaksi yang terbentuk terbatas pada kesepakatan atau perjanjian, seperti yang dibuat antara DLH dengan aktor lainnya. Hubungan formal yang terjalin menurut aktor komunitas berarti bahwa hubungan tersebut hanya sebatas sesama orang yang memiliki kesamaan minat pada lingkungan. Interaksinya pun lebih tidak terbatas pada kesepakatan atau lebih fleksibel dan tidak resmi untuk berbagi informasi, seperti yang dilakukan aktor komunitas. Apa yang dikatakan oleh pengelola TPS 3R Bhismas Mulia dapat disimpulkan bahwa masih banyak aktor komunitas di Kabupaten Semarang yang baru merintis, sehingga kemungkinan hubungan antar aktor komunitas juga akan menemukan tipe hubungan dan interaksinya.

Kelima, kepercayaan dan formalitas dalam hubungan jejaring kebijakan terbangun dengan perjanjian, kesepakatan atau kontrak kerja antar aktor, yang pada level tertentu memengaruhi kepercayaan dalam hubungan antar aktor. Kepercayaan muncul dari formalitas yang dibangun antar aktor.

Formalitas dalam jejaring kebijakan antara aktor pemerintah dengan aktor komunitas, aktor pemerintah (tingkat desa) dan aktor akademis terbangun baik tertulis maupun tidak

tertulis sesuai dengan usaha masing-masing. Aktor pemerintah memiliki MoU dengan PDAM dan beberapa KSM, surat rekomendasi dengan BUMDes, surat keputusan dengan Forum Relinko, dan sekedar surat permohonan dengan sekolah-sekolah; dan lisan dengan kelompok masyarakat tertentu. DLH Kabupaten Semarang berpendapat bahwa formalitas yang dibangun melalui perjanjian yang sah dan tertulis seperti MoU dapat menciptakan kepercayaan yang lebih kuat di antara aktor. Para aktor juga dapat membangun interaksi yang baik sebagai upaya mengurangi sampah secara tidak tertulis. Dengan adanya kesepakatan antar aktor, sampah dapat berkurang; dan interaksi yang terbangun lebih konsisten, karena adanya kewajiban dan hak yang jelas dan harus dilaksanakan. Dari situlah muncul kepercayaan antar aktor. Interaksi tersebut muncul karena adanya kepentingan sesama aktor dalam pengelolaan sampah, seperti arahan-arahan DLH kepada aktor lain, bimbingan, bantuan fasilitas pengelolaan sampah, bantuan tenaga relawan untuk pengelolaan sampah, dan lain sebagainya.

Namun, masih ada kendala dalam hubungan terkait teknis operasional di lapangan yang berkaitan dengan fasilitas pengelolaan sampah, khususnya transportasi. SMA Negeri 1 Bringin mengatakan bahwa pengangkutan sampah belum konsisten dan tidak mencapai seluruh bagian di Kabupaten Semarang. Sehingga, aktor dalam jejaring harus saling berkomunikasi secara terbuka.

Keenam, pengambilan keputusan partisipatif, berkaitan dengan kolaborasi dan keterlibatan aktor-aktor dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Kebijakan pengelolaan sampah merupakan salah satu kebijakan nasional yang dilimpahkan kepada daerah untuk mengelola sampah secara leluasa, seperti menciptakan inovasi untuk mengatasi persampahan di daerahnya. Kolaborasi yang terbangun di antara aktor ini berupa koordinasi, hubungan yang saling menguntungkan, sosialisasi dan pelatihan. DLH sebagai aktor pemerintah memiliki peran sebagai aktor utama yang dalam pengelolaan sampah senantiasa memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah oleh aktor-aktor lain dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan, seperti KSM di TPS 3R Bhismas Mulia dan BUMDes Estu Mukti. TPS 3R Bhismas Mulia berhasil menjadi satu-satunya TPS 3R di Kabupaten Semarang yang tidak menyumbang sampah ke TPA Blondo.

Sementara itu, Forum Relinko berperan dalam mengelola sampah organik menjadi pakan ternak BSF atau maggot. PT Coca-Cola Amatil Indonesia mewakili aktor bisnis ikut berperan bersama Yayasan Bintari memberikan sosialisasi dan fasilitas kepada masyarakat dalam pengembangan bank sampah. Sementara itu, aktor akademis berperan dalam memberikan edukasi kepada warga sekolah sebagai bagian masyarakat, serta mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA Blondo.

Aktor pemerintah di sini merupakan aktor yang mendominasi proses kebijakan, dari pengambilan keputusan, implementasi hingga evaluasi. Dalam berbagai macam kebijakan, aktor pemerintah memang merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan jarang melibatkan aktor lain, seperti dalam formulasi kebijakan *smart city* di Kota Semarang (Fauzi & Dewi Rostyaningsih, 2018:10). Interaksi antara aktor pemerintah dengan aktor lain juga berupa koordinasi (2018:15), seperti yang terjadi di dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.

Terakhir, kepemimpinan yang kolaboratif berarti bahwa setiap pemimpin yang ada di dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang memiliki nilai yang sama untuk membentuk struktur jejaring kebijakan yang lebih seimbang.

Kepemimpinan yang kolaboratif dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang terwujud melalui kesempatan bagi setiap aktor untuk terlibat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kapasitasnya. Aktor lainnya juga telah memiliki tujuan dan nilai yang sama dalam pengelolaan sampah. Aktor pemerintah desa (BUMDes) dan komunitas (TPS 3R), yang berada lingkup rumah tangga juga memberikan fasilitas dan sosialisasi. Aktor bisnis juga sudah ikut menggerakkan masyarakat untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah.

Ain et al. (2021:5-6) mengatakan bahwa pemimpin yang kolaboratif juga merupakan pemimpin yang memberikan fasilitas untuk menciptakan kolaborasi antar aktor. DLH Kabupaten Semarang sendiri mengaku sebagai *leading sector* atau aktor yang memimpin pengelolaan sampah. Kepemimpinan DLH memiliki nilai yang bagus di mata para aktor melalui pengadaan fasilitas kebersihan bagi aktor-aktor pengelola sampah di setiap lapisan dan kelompok masyarakat. DLH Kabupaten Semarang juga memberikan sosialisasi kepada aktor lain. Kekurangannya adalah keterlambatan mengangkut sampah dan belum terpenuhinya fasilitas pengelolaan sampah.

Aktor dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan menurut perannya. Viney (2007:2) membagi peran aktor sesuai tingkat *influence* dan *importance* aktor.

Aktor yang memiliki *influence* dan *importance* yang tinggi disebut aktor *partner*. Aktor ini membentuk koalisi aktor-aktor sebagai pendukung kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang dan Forum Relawan Lintas Komunitas (Relinko) merupakan aktor *partner*. DLH Kabupaten Semarang sebagai aktor utama mengakomodasi, memfasilitasi, dan mendampingi hampir semua program dalam pengelolaan sampah. DLH Kabupaten Semarang membentuk sebuah jejaring kebijakan dengan sesama aktor pemerintah, aktor bisnis/swasta, aktor komunitas, dan aktor akademis. Forum Relinko terdiri dari komunitas-komunitas berbagai sektor yang dibentuk oleh DLH Kabupaten Semarang secara otomatis membangun kerja sama dengan berbagai aktor, termasuk aktor pemerintah, aktor bisnis, dan aktor komunitas lainnya. Forum Relinko juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan sering terlibat pada program-program milik DLH dan dimintai ataupun memberikan pandangan-pandangannya mengenai pengelolaan sampah.

Aktor yang memiliki pengaruh yang lebih tinggi, tetapi dengan tingkat kepentingan yang lebih rendah dan harus tetap ada keberadaannya disebut aktor *consult*. Aktor ini dilibatkan dalam berdiskusi seputar kebijakan atau program yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil wawancara, aktor *consult* dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang ini adalah BUMDes Estu Mukti Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa. Keberadaan BUMDes Estu Mukti memiliki pengaruh tinggi dalam membantu DLH Kabupaten Semarang untuk mengelola sampah di tingkat desa, hingga pernah memberikan masukan tentang pengambilan sampah di setiap desa yang dilakukan seminggu sekali, ditingkatkan menjadi seminggu dua kali. Akan tetapi, pendapat aktor ini dinilai kurang penting, sehingga belum dilaksanakan.

Aktor dengan pengaruh yang lebih rendah, tetapi dengan kepentingan yang lebih tinggi *inform*. Keberadaan aktor ini cukup penting, dengan opini atau masukannya. Berdasarkan hasil wawancara, aktor *inform* adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPS 3R Bhismas Mulia, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru. Perwakilan aktor ini mengatakan bahwa mereka belum tahu banyak mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang ini, seperti harga sampah yang ada di

tingkat kabupaten. Walaupun demikian, KSM di TPS 3R Bhismas Mulia berani mengusulkan untuk mengelola sampah beberapa desa sekitar Desa Kebondowo. DLH Kabupaten Semarang menyetujui usulan tersebut dengan memberikan surat rekomendasi, sehingga TPS 3R Bhismas Mulia mampu mengurangi sampah yang masuk ke TPA Blondo jauh lebih banyak. Artinya, KSM di TPS 3R memiliki masalah yang cukup penting, walaupun pengaruhnya hanya terbatas di tingkat desa, dan paling luas pun hanya di kecamatan.

Aktor *control* merupakan aktor pemangku kepentingan yang tidak begitu penting ataupun berpengaruh. Keberatan, keluhan atau masukan mereka kurang dipertimbangkan secara serius. Aktor hanya menerima setiap kebijakan pengelolaan sampah yang diimplementasikan melalui berbagai program, dan keberatan atau masalah mereka mereka kurang dipertimbangkan. Aktor yang memiliki peran *control* ini adalah aktor akademis, yaitu SMA Negeri 1 Bergas dan SMA Negeri 1 Bringin. Mereka tidak pernah dimintai pendapat atau masukan untuk pengembangan kebijakan ataupun masalahnya tidak dianggap begitu penting. Keterlibatan aktor akademisi cenderung kurang, seperti dalam Ismiartha et al. (2021:14) tentang analisis stakeholder dalam pengelolaan sampah program kampung iklim di Dusun Soka, Kabupaten Semarang. Padahal, peran akademisi yang maksimal dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih inovatif dari kelompok masyarakat yang kecil.

Dalam jejaring kebijakan ini, adapun faktor-faktor yang telah tercapai yaitu elemen partisipasi, pluralisme, dan keterbukaan. Sementara itu, faktor yang belum tercapai adalah elemen kolaborasi. Faktor-faktor yang tercapai tadi merupakan faktor pendukung, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung dari dalam berdasarkan elemen partisipasi meliputi sikap aktor taat dalam pembayaran dan mengikuti peraturan tentang proses pengelolaan sampah. Sedangkan faktor pendukung dari luar berdasarkan elemen partisipasi adalah memberikan sosialisasi pembilahan sampah, dan melakukan pendekatan kepada warga yang belum ikut bank sampah. Elemen pluralisme ditunjukkan melalui tujuan-tujuan dalam mewujudkan kesadaran membuang sampah dan memilah sampah dan membentuk karakter masyarakat sejak dini untuk mengelola sampah yang merupakan faktor pendorong eksternal. Terakhir, elemen keterbukaan, aktor sudah terbuka untuk bekerja sama, termasuk dengan aktor luar daerah. Sementara itu, faktor penghambat dari elemen kolaborasi meliputi beberapa aktor hanya bekerja sama dengan DLH, dan aktor komunitas belum memiliki koneksi dengan aktor bisnis. Kelemahan jejaring kebijakan ini berdasarkan elemen kolaborasi adalah kurang insiatif dari para aktor untuk melakukan pendekatan satu sama lain.

Hasil penelitian ini kemudian dapat dikembangkan lebih detail dan rinci pada penelitian selanjutnya. Fenomena yang dapat digali lebih lanjut lagi adalah analisis aktor bisnis dan aktor media dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang dengan menggunakan data primer, sebab kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya bukti primer dari kedua aktor tersebut. Aktor bisnis, khususnya, memiliki potensi dan peran yang besar dalam menggerakkan masyarakat dalam mengelola sampah.

SIMPULAN

Jejaring kebijakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang belum memenuhi tujuh karakteristik dari DeLeon dan Varda secara keseluruhan. Dari hasil paparan di atas, kekurangan dari jejaring kebijakan ini adalah masih kurangnya

keterlibatan aktor bisnis. Informasi yang belum tersebar secara merata karena kurangnya desentralisasi. Sehingga, aktor pemerintah di sini pun masih mendominasi atau memegang kendali paling tinggi. Kontrak kerja yang kurang memadai, supaya formalitas dapat membentuk kepercayaan yang kuat. Aktor juga lebih banyak terlibat dalam implementasi kebijakan dibandingkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, belum adanya kerja sama dengan aktor lain, khususnya antara aktor akademis dengan aktor selain pemerintah

Sementara itu, jejaring kebijakan ini sudah menunjukkan kerja sama dari aktor komunitas dengan berbagai aktor hingga dapat membentuk jejaring. Sayangnya, peran aktor akademisi masih kurang. Masing-masing aktor menunjukkan keberagaman dalam keharmonisan tujuan dan nilai. Antar aktor juga bertukar informasi dan sumberdaya yang memperlancar komunikasi dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sementara itu, pembagian kekuasaan antar aktor masih belum merata, karena aktor pemerintah masih memegang kendali atas pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang. Hubungan antar aktor juga cenderung formal dengan adanya dualisme makna dari formal di dalam jejaring kebijakan ini. Formalitas yang diukur dari perjanjian antar aktor juga memengaruhi kepercayaan antar aktor. Partisipasi aktor-aktor membentuk kolaborasi yang berupa koordinasi, hubungan yang saling menguntungkan, sosialisasi dan pelatihan. Setiap aktor untuk menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan terlibat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kapasitasnya.

Faktor pendukung dan penghambat menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan rumah tangga belum efektif, dengan kurangnya elemen kolaborasi di sini. Sementara, tercapainya pluralisme dan keterbukaan menunjukkan aktor-aktor di sini sudah memahami tujuan kebijakan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga ada kejelasan dalam hal tanggung jawab, peran serta masyarakat, dan dunia usaha. Tanggung jawab aktor terlihat dari taatnya dalam pembayaran, mengikuti peraturan tentang proses pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi pembilahan sampah, dan melakukan pendekatan kepada warga yang belum ikut bank sampah. Aktor juga mewujudkan kesadaran membuang sampah dan memilah sampah dan membentuk karakter masyarakat sejak dini untuk mengelola sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, K. Q., Nasri, M. A., Alamsyah, M. N., Pratama, M. D. R., & Kurniawan, T. (2021). Collaborative governance in managing plastic waste in Bali. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012115>
- Amir, M., & Anto, R. P. (2018). A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency-Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 11(1), 90. <https://doi.org/10.5539/jsd.v11n1p90>
- Ariyanto, E. D., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Journal Public Policy and Management Review*, 10(2), 221–239.
- DeLeon, P., & Varda, D. M. (2009). Collaborative Policy Networks. *Policy Studies Journal*, 37(1), 59–74.
- Dente, B. (2014). Who Decides? Actors and Their Resources. In *Understanding Policy Decisions*. POLIMI SPRINGER BRIEFS. <http://www.polimi.it>

- Ezra, M., Zarkasyi, A., & Hanani, R. (2022). Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Bank Sampah Kencana, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Fatahya, & Abidin, F. A. (2017). Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 625–634.
- Fauzi, A. N., & Dewi Rostyaningsih. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 1–18.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22052/20296>
- Gayatri, S. U., Baiquni, M., Darwin, M., & Tumiran, T. (2019). Aktor dan Konfigurasi Subsistem dalam Perubahan Kebijakan Pengolahan Sampah Menjadi Listrik di Provinsi DKI Jakarta. *Populasi*, 26(2), 47. <https://doi.org/10.22146/jp.44149>
- Ismiartha, G. R., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis Stakeholders dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklam) sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 86–103.
- Jateng Daily. (2020). *Warga Desa Randugunting Tumbuhkan Gerakan Kelola Sampah Mulai dari Rumah*. [Jatengdaily.Com. https://jatengdaily.com/2020/warga-desa-randugunting-tumbuhkan-gerakan-sampah-mulai-dari-rumah/](https://jatengdaily.com/2020/warga-desa-randugunting-tumbuhkan-gerakan-sampah-mulai-dari-rumah/)
- Mokodompis, Y., KAunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Muhamad Azahar Abas, & Wee, S. T. (2016). Sustainable Solid Waste Management in Malaysia : The Concept of Multi-Stakeholder Governance in Solid Waste Policy Implementation. *Public Policy & Administration Research*, 4(10), 26–36.
<file:///C:/Users/linds/Downloads/16417-18910-1-PB-libre.pdf>
- Muharam, R. S., Taryono, O., Maasir, L., & M, S. W. (2021). Policy Networks in Improving the Quality of Housing and Settlements in Indonesia (A Case Research of Bandung District). *Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding*, 3, 84–89. <https://doi.org/10.52162/3.2021116>
- Nastase, C., Chaşovschi, C. E., State, M., & Scutariu, A. L. (2019). Municipal waste management in Romania in the context of the EU. A stakeholders' perspective. *Technological and Economic Development of Economy*, 25(5), 850–876.
<https://doi.org/10.3846/tede.2019.10295>
- Oktaviana, K., Warsono, H., Setianingsih, E. L., Soedarto, J. H., Tembalang, S. H., & Kotak, S. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang*. 112–128.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/35960>
- Pribadi, B., & Aminah, A. N. (2020). *Produksi Sampah Rumah Tangga Meningkat Selama Pandemi*. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qa5tq9384/produksi-sampah-rumah-tangga-meningkat-selama-pandemi>
- Rahman, A., Myrna, R., & Karlina, N. (2020). Policy Implementation of Solid Waste Management by The Environmental Office of Bekasi Regency. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 10(1), 102–110.
<https://doi.org/10.31289/jap.v10i1.3601>

- Rodić, L., & Wilson, D. C. (2017). Resolving governance issues to achieve priority sustainable development goals related to solid waste management in developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/su9030404>
- Shams, S., Sahu, J. N., Rahman, S. M. S., & Ahsan, A. (2017). Sustainable waste management policy in Bangladesh for reduction of greenhouse gases. *Sustainable Cities and Society*, 33(February), 18–26. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.05.008>
- Viney, D. (2007). Stakeholder Analysis and Stakeholder Management. *Ezine Articles Newsletter-And_Business-Online*, 1–3. /Ecommerce: %0AWeb@ Ezinearticles.com, %0Ahttp://EzineArticles.com/?expert=Da%0Avid Vine
- Vos, J. F. J. (2003). Responsibility and the Identification of. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 152, 141–152.
- Wardhani, P. P. (2020). POLA KEMITRAAN STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SEMARANG 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis TPS 3R Di Desa Bergas Kidul). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(2), 81–90. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27260/23831>
- Yusuf, M., Adams, C., & Dingley, K. (2016). Digital citizen participation within schools in the United Kingdom and Indonesia: An Actor-Network Theory (ANT) perspective. *Information (Switzerland)*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/info7040069>